

# Moralitas, Kapabilitas, dan Perilaku Kerja Inovatif Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sri Wilujeng Rizki Amalia<sup>1</sup>  
Loggar Bhilawa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*Correspondences: [sri.19049@mhs.unesa.ac.id](mailto:sri.19049@mhs.unesa.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh moralitas, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif terhadap pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada aparatur desa yang berhubungan langsung dengan keuangan desa. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 178 orang dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi IBM SPSS 26. Hasil pengujian menunjukkan moralitas, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Moralitas, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif yang dimiliki aparatur desa akan mampu mencegah adanya kecurangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terlaksananya pengelolaan dana desa yang baik dalam realokasi dan refocusing APBN.

Kata Kunci: Moralitas; Kapabilitas; Kinerja Inovatif; Pengelolaan; Dana Desa

## *Morality, Capability, and Innovative Work Behavior of Village Apparatuses in the Management of Village Funds*

### ABSTRACT

*The research aims to determine the effect of morality, capability, and innovative work behavior on the management of village funds. The data collection method was carried out by distributing questionnaires to village officials who were directly related to village finances. The number of samples in the study were 178 people and were selected using a purposive sampling technique. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS 26 application. The test results show that morality, capability, and innovative work behavior of village apparatus have a positive effect on village fund management. The morality, capability, and innovative work behavior of the village apparatus will be able to prevent village fund fraud and increase the accountability of village fund management. This research is expected to contribute to the implementation of good management of village funds in the reallocation and refocusing of the APBN.*

Keywords: *Morality; Capability; Innovative Performance; Management; Village Fund.*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 4  
Denpasar, 26 April 2023  
Hal. 935-954

DOI:  
*10.24843/EJA.2023.v33.i04.p05*

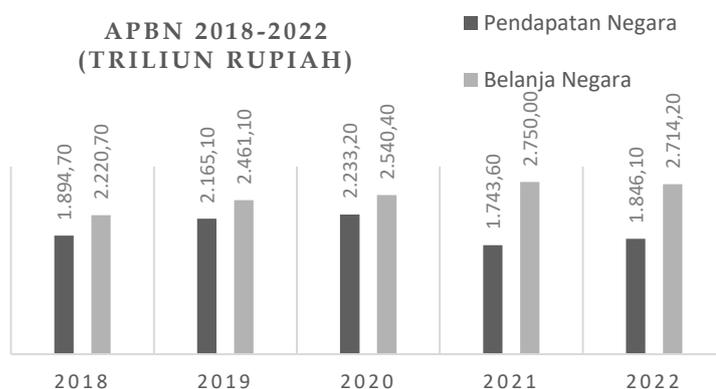
**PENGUTIPAN:**  
Amalia, S. W. R., & Bhilawa, L. (2023). Moralitas, Kapabilitas, dan Perilaku Kerja Inovatif Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 935-954

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
7 Maret 2023  
Artikel Diterima:  
25 April 2023

## PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan desa ialah sebuah bentuk usaha dalam mendukung pelaksanaan *asifikasi* desa, pelaksanaan sebuah pemerintahan desa, pemberdayaan dan pemeliharaan masyarakat desa (Riyanto, 2015). Pemerintah desa sebagai entitas publik diharapkan dapat mengelola dan mempergunakan anggaran yang dimiliki sebagai pilihan utama masyarakatnya dalam membantu perekonomian dan sosialnya. Fanani, *et al.* (2014) menjelaskan bahwa sejak ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa maka dapat diperkirakan akan menjajaki babak baru dalam hal pembangunan dan pengelolaan wilayahnya. Peraturan yang dibuat membawa tumpuan, pijakan, dan harapan-harapan baru bagi kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan pemerintahan yang ada di wilayah desa (Ismail, *et al.*, 2016).

Pemerintah mempunyai anggaran yang cukup besar guna dialokasikan ke seluruh desa yang menjadi pelumas roda pembangunan ekonomi desa dalam tiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Dana yang didistribusikan ke desa ialah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransmisikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan selanjutnya ditransmisikan kepada semua desa. Pemerintah desa sebagai entitas publik diharapkan dapat mengelola dan mempergunakan anggaran yang dimiliki sebagai pilihan utama masyarakatnya dalam membantu perekonomian dan sosialnya (Riyanto, 2015).



**Gambar 1. APBN Tahun 2018-2022**

*Sumber* : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan data dari kementerian keuangan menunjukkan persentase kenaikan paling besar terkait anggaran pendapatan negara adalah pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebanyak 240,40 triliun rupiah serta anggaran belanja sebesar 270,40 triliun rupiah dan mengalami penetapan peningkatan APBN yang hampir stabil dari tahun 2019-2022. Kenaikan APBN tersebut dikarenakan terdeteksinya *coronavirus* di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan pada awal bulan Maret 2020 *coronavirus* masuk ke Indonesia sehingga kondisi negara mengharuskan perubahan peraturan dalam segala aspek kehidupan masyarakat seluruhnya, termasuk APBN. Adanya pandemi *covid-19* di Indonesia begitu luar biasa dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga, perekonomian nasional, dan kondisi sosial ekonomi. Taraf hidup masyarakat, pengangguran, dan tingkat

kemiskinan, semakin lama juga menunjukkan angka yang semakin menurun (Baharuddin & Sulfati, 2020).

Untuk menstabilkan kondisi perekonomian yang memburuk pada saat *covid-19*, pemerintah Indonesia melakukan realokasi dan *refocusing* APBN dan APBD yang otomatis berdampak juga terhadap alokasi anggaran dana desa yang kemudian diperuntukkan untuk penanggulangan *covid-19* sehingga struktur didalamnya banyak yang mengalami perubahan. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mengatur keuangan daerah saat pandemi. Namun apabila *refocusing* anggaran tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan penganggaran yang tepat, maka akan menyebabkan penganggaran pada keuangan daerah menjadi tidak stabil (Mardiana, *et al.*, 2021).

Sebelum adanya *covid-19* besaran anggaran dana desa di tahun 2018 yakni 59,9 triliun rupiah dan meningkat drastis pada tahun 2019 sebesar 69,8 triliun rupiah. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga tahun 2020 sampai dengan 2021 sebesar 72 triliun rupiah, selanjutnya mengalami penurunan senilai 4 triliun rupiah di tahun 2022. Dana sejumlah 68 triliun rupiah di tahun 2022 ini ditransmisikan kepada 74.962 desa yang terdapat dalam 434 kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh wilayah NKRI (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021).

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai percepatan penanganan *covid-19* di lingkungan pemerintah daerah, kebijakan penganggaran dana desa mengalami pergeseran yakni anggaran dana desa ditambahkan dalam kegiatan penanggulangan *covid-19* salah satunya BLT dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Besaran alokasi anggaran dana desa dari tahun 2019 sampai dengan 2020 fokus pembiayaannya adalah diperuntukkan untuk penanggulangan wabah pandemi *covid-19* dan mengatasi masalah ekonomi. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 pengalokasian dana desa digunakan untuk keperluan pemulihan/perbaikan ekonomi nasional dan belanja kesehatan guna menangani pandemi *covid-19* serta belanja lainnya yang diprioritaskan.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kota yang terdampak *covid-19* hingga sempat dinyatakan sebagai kota dengan jumlah pasien *covid-19* terbanyak setelah Kota Surabaya. Hal tersebut berdampak pada berbagai sektor mengalami penurunan, termasuk sektor ekonomi. Ancaman kerentanan sosial ekonomi terjadi di beberapa wilayah Sidoarjo. Salah satu wilayah yang terdampak langsung perekonomian masyarakatnya yang disebabkan oleh pandemi *covid-19* adalah Kecamatan Balongbendo yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Balongbendo menjadi salah satu kecamatan yang berada dalam zona merah kemiskinan dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata 5,56% dari 6 kecamatan lain yang masuk diantaranya Tarik, Prambon, Krembung, Tulangan, Taman, dan Krian. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020 angka kemiskinan akibat dari *covid-19* mengalami peningkatan hingga 1,63 juta penduduk dari tahun 2019-2020. Naiknya angka kemiskinan akibat dari angka pengangguran yang meningkat karena banyak penduduk yang dirumahkan/mengalami PHK.



**Gambar 2. Jumlah Dana Desa Kec. Balongbendo Tahun 2019-2022**

*Sumber* : Pemerintah Kec. Balongbendo Bag. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan data dari Pemerintah Kec. Balongbendo Bag. Administrasi Pemerintahan jumlah anggaran dana desa di Kecamatan Balongbendo pada tahun 2018 ialah sebesar Rp15,9 miliar, tahun 2019 sebesar Rp19,2 miliar, tahun 2020 sebesar 18,6 miliar, tahun 2021 sebesar Rp18 miliar, dan pada tahun 2022 sebesar 18,9 miliar. Jumlah dana desa tertinggi yang dianggarkan kepada 20 desa di kecamatan Balongbendo berada pada tahun 2019 yakni sebesar Rp19,2 miliar. Pada tahun 2019 ini adalah awal di Indonesia diserang *covid-19* sehingga anggaran untuk dana desa lebih diprioritaskan. Pertumbuhan dana desa dari 2018 ke 2019 cukup banyak yakni sebesar Rp3,2 miliar. Pada peraturan bupati Kabupaten Sidoarjo, penganggaran dan pelaksanaan suatu dana desa dimaksimalkan guna mempercepat *SDGs* Desa dengan ekonomi nasional yang pulih sesuai kekuasaan desa, kegiatan prerogatif nasional berdasarkan kekuasaan desa, dan penyesuaian kehidupan yang baru (Peraturan Bupati Sidoarjo, 2021).

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dana dalam masa pandemi *covid-19* harus di adakan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan (Mardiana *et al.*, 2021). Aparatur desa harus bisa mengimplementasikan aktivitas kerjanya dengan berprinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Pada akhir urusan pelaksanaan pemerintahan desa harus bisa mempertanggungjawabkan balik kinerjanya kepada warga desa (Pilcher & Gilchrist, 2018). Namun pada saat ini, dalam praktiknya masih ada persoalan secara internal yang dialami oleh desa terutama dalam hal aparturnya sendiri yang masih kurang kompeten dan percaya diri dalam mengatur potensi ekonomi desa yang ada serta sumber-sumber dananya untuk tumbuh secara alamiah serta dengan otonomi yang ada kurang begitu berkembang dengan optimal (Samankova *et al.*, 2018).

Teori Stewardship dianggap satu diantaranya teori yang berhubungan dengan fenomena ini. Konsep dalam teori ini memberikan definisi bahwa dalam pengaturan/penatausahaan suatu entitas mempunyai peranan mengatur aset yang telah diamanahkan kepadanya serta mempunyai tanggung jawab terhadap pemilik (Donaldson & Davis, 1991). Pengorganisasian suatu entitas sebagai steward serta pemilik sebuah organisasi bertugas sebagai prinsipal (Diatmika & Rahayu, 2020). Apabila dikaitkan dalam pemerintahan desa, aparatur atau perangkat desa

berlaku sebagai stewardnya (pihak yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola/mengatur keuangan desa) dan masyarakat menjadi *principal* karena mempunyai hak dalam menerima pertanggungjawaban. Selain itu juga perangkat desa memiliki tanggungjawab penuh kepada pemerintahan daerah (kab/kota) sebagai pertanggungjawaban yang vertikal (Arfiansyah, 2021). Dalam teori perkembangan moral menurut Kohlberg (1963) menjelaskan bahwa perkembangan moral pada seseorang akan selalu diikuti oleh matangnya kecerdasan. Apabila kecerdasan seseorang sudah matang maka moral seseorang juga matang pula. Teori kapabilitas dinamik dalam sudut pandang instansi desa mengilustrasikan bahwa diperlukan kapabilitas seseorang yang dapat beradaptasi pada perkembangan situasi (Teece, Pisano, Shuen, 1997). Dalam teori COR juga dijelaskan bahwa seseorang memiliki motivasi dalam meningkatkan kapasitas psikologisnya (Hobfoll, et.al., 2018)

Moralitas dan kapabilitas individu kepala desa dan perangkat desa yang baik akan mampu mengatur anggaran dana desa secara efektif, begitupula dengan adanya dukungan inovasi dalam bekerja. Akan tetapi dalam praktik pengelolaan keuangan dana desa banyak terjadi praktik kecurangan (Gide, 2019). Disengaja maupun tidak sengaja (disebabkan ketidaktahuan cara penggunaan maupun pemberitahuan manajerial keuangan) oleh aparat desa serta siapa pun yang terlibat dan berhubungan dengan pemanfaatan keuangan desa. Masih banyak dana menganggur (*idle fund*) yang dimiliki pemerintah daerah yang kerap kali dijadikan modus korupsi bagi para pemangku daerah (Fathur, 2016). Masih banyak masyarakat desa yang kurang memahami mengenai kapabilitas, moralitas serta perilaku kerja inovatif yang dimiliki oleh kepala desa. Masyarakat pada umumnya hanya melihat dari garis besarnya saja dan hanya dari asumsi masyarakat yang lain (Moonti & Kadir, 2018).

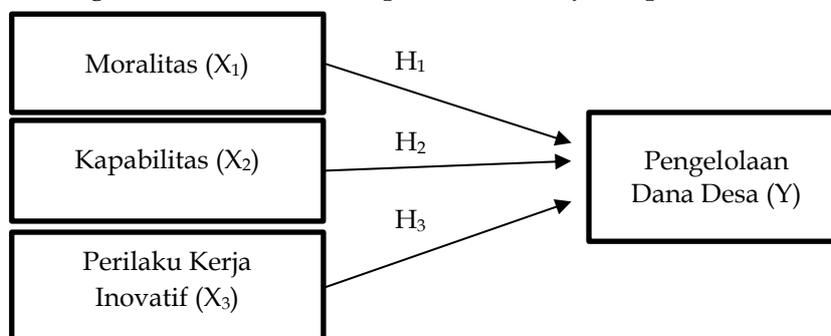
Setiap tahunnya kasus korupsi dana desa di Indonesia terus mengalami peningkatan. Rata-rata dalam tiap tahun terjadi kasus korupsi pada sektor desa ialah sebanyak 61 kasus, yang dilakukan oleh 52 kepala desa serta terjadi kerugian keuangan negara mencapai hingga Rp256 miliar. Pada tahun 2015-2019 korupsi sektor desa secara keseluruhan mencapai Rp1,28 triliun. Kasus-kasus diatas mencakup penyelewengan anggaran, laporan keuangan, kecurangan, membengkakkan anggaran, dan sogok atau suap (CNN Indonesia, 2019). Menurut hasil peninjauan *Indonesian Corruption Watch* juga menunjukkan bahwa anggaran desa menjadi sektor paling rawan terjadinya penyelewengan/korupsi selama tahun 2018, tercatat 96 kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa (Alamsyah et al., 2018).

Pengawasan dan penilaian kinerja pada pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisir angka kasus penyelewengan dana desa yang terjadi. Kepala desa mempunyai andil penuh dalam memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat desa berjalan secara optimal. Dalam mengukur kinerja perangkat desa, kepala desa menggunakan instrumen KPI. KPI ialah sekumpulan pengukuran yang berfokus pada aspek kinerja organisasi yang paling berpengaruh pada keberhasilan organisasi saat ini dan di masa depan (Ndruru & Halawa, 2020). KPI menjadi instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang dapat mencakup kedisiplinan, kejujuran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, inovasi dan/atau inisiatif

individu dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja secara umum. Dengan adanya KPI sebagai *performance indicator* dapat menjadi tolak ukur pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi kinerjanya serta mendukung kesadaran individu untuk bekerja sesuai moral, kecakapan diri yang tinggi, serta inovasi kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, *et al.*, (2018) mengemukakan apabila moralitas individu signifikan mempunyai pengaruh dalam mencegah adanya penyelewangan anggaran dana desa. Lemahnya kapabilitas dan moralitas setiap aparatur desa juga menjadi penyebab rawannya tata kelola keuangan dana desa yang lemah, kurang transparan dan partisipatif terhadap masyarakat desa (Hasanah, *et al.*, 2019). Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi, Yuniasanti & Prahara, (2017) juga menyatakan bahwa perilaku inovasi dalam organisasi adalah satu diantara penyebab yang mendukung keberhasilan sebuah organisasi dalam tata kelola organisasi maupun aspek didalamnya. Penelitian lain yang terkait dengan fenomena ini juga sudah banyak diteliti diantaranya: Yusuf, *et al.* (2018), Lestari & Ayu (2021), Fadly, Wahyudi & Yetti, (2020), Mutmainah (2022), Adiputra & Mandala (2017), Diatmika & Rahayu (2020), Abdulkarim (2019), Suaib & Bake (2016). Akan tetapi hasil dari penelitian sebelumnya memperoleh hasil yang beragam, sehingga dibutuhkan pengujian lanjutan.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha memberikan hasil analisis dan bukti empiris yang lebih dalam tentang perilaku-perilaku individu yang berhubungan dengan pengaturan dana desa pemerintahan desa se-Kecamatan Balongbendo dalam situasi yang lebih spesifik yakni situasi adanya pandemi *covid-19* disaat pemerintah harus melakukan realokasi dan *refocusing* APBN demi menanggulangi dan memulihkan perekonomian nasional. Dalam riset ini diharapkan juga bisa memberikan referensi serta informasi serta arahan bagi peneliti lain yang terkait dengan moralitas, kapabilitas individu dan perilaku kerja inovatif oleh aparatur desa terhadap tata kelola keuangan dana desa, bagi akademisi agar mampu menjadi tumpuan atau pijakan bagi usaha dalam mengembangkan ilmu pemerintahan guna pembangunan pemerintahan daerah maupun nasional, serta bagi pemerintah desa supaya dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja individu aparatur desa dalam memahami serta mengimplementasikan moralitas yang baik dalam bekerja, meningkatkan kapabilitas individu dan perilaku kerja yang inovatif sebagai upaya dalam tata kelola keuangan dana desa. Model penelitian disajikan pada Gambar 3 berikut.



**Gambar 3. Model Penelitian**

Sumber : Data Penelitian, 2023

Peningkatan kasus penyelewengan anggaran desa yang meningkat sangat dipengaruhi oleh pelaku organisasi desa didalamnya yang mengelola serta mempertanggungjawabkan terlaksananya pengelolaan keuangan desa. Perilaku aparatur desa yang bertindak sesuai moral dan bertanggungjawab yang tertanam dalam dirinya akan sangat mempengaruhi terlaksananya tata kelola keuangan dana desa dengan baik. Suatu aturan atau kaidah yang mengontrol perilaku manusia di masyarakat untuk berbuat baik sesuai kaidah dan aturan disebut moral. Tingkatan moralitas individu yang tinggi akan bisa meminimalisir dan menghindari adanya kecurangan karena setiap personal yang bermoral tinggi akan mengikuti segala aturan sesuai atribut etika umum (Ozler & Gabrinetti, 2017). Level penalaran moral dalam personal seseorang sebagai acuan guna mengetahui tendensi individu menjalankan perbuatan khusus, terpenting yang berkorelasi dengan dilema moral, sesuai level penalaran moralnya (Alawattage, et.al., 2022). Apabila level penalaran moral seseorang menunjukkan angka yang tinggi, akan semakin mungkin untuk melaksanakan hal yang benar (Kerstein, 2002). Uraian sebelumnya sependapat dengan hasil riset yang dilakukan oleh Yusuf, *et al.*, (2018) dan Mutmainah, (2022) menemukan bahwa moralitas berpengaruh positif serta signifikan terhadap keakuntabilisan tata kelola dana desa baik secara parsial ataupun simultan. Moralitas memiliki pengaruh terhadap tata kelola keuangan desa sebab makin tinggi moralitas pelaku tata kelola (aparatur desa) dalam mengatur dana desa maka makin akuntabel pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 1 disimpulkan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Moralitas individu berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan dana desa.

Peningkatan peran digitalisasi serta kekompleksan dalam bidang kerja menuntut aparatur desa memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Suatu proses mengimplementasikan kemampuan, wawasan, serta pengalaman yang ada pada diri individu dimaknai sebagai kapabilitas. Individu yang konsisten dan mau terus belajar dalam mengembangkan kapabilitas pada dirinya bisa menjadikan dirinya makin terampil dan bisa mengembangkan kinerja (Kurzahls, 2015). Kapabilitas sebagai ciri atau kekhasan yang melandasi individu dalam mewujudkan tingginya kinerja mereka. Individu yang tidak memiliki pemahaman yang cukup maka kinerjanya tidak akan berjalan lancar dan menimbulkan terjadinya inefisiensi bahan, tenaga, serta waktu (Chatterjee, et.al., 2022). Kapabilitas dalam diri aparatur desa akan mengetahui seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam bertugas sekaligus menjadi acuan dalam memiliki pemahaman akan dasar akuntansi dalam mengamankan keuangan desa (Arfiansyah, 2021). Aparatur desa harus mempunyai kapabilitas ilmu/wawasan maupun kapabilitas keterampilan tentang akuntansi supaya dapat memahami logika akuntansi dalam hal mengorganisir keuangan desa. Pernyataan sebelumnya sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Respatiningsih & Sudirjo (2015) dan Azmi & Harti (2021) juga menemukan bahwa kapabilitas mempunyai pengaruh yang positif pada kinerja entitas dalam pengelolaan keuangan. Akan tetapi, ada ketidaksesuaian hasil riset yang dilakukan oleh Fadly, Wahyudi & Yetti, (2020) bahwa kapabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sesuai pernyataan sebelumnya maka hipotesis 2 dirumuskan berikut ini:

H<sub>2</sub> : Kapabilitas individu berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan dana desa.

Dengan adanya tantangan kerja yang tidak terduga menuntut aparatur desa untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan tantangan kerja yang ada, seperti halnya munculnya *covid-19*. Keinovatifan kerja diperlukan pelaku entitas agar bisa menghadapi perubahan tantangan kerja yang dinamis. *Perilaku kerja inovatif dalam diri aparatur desa* dapat menunjang kinerja dan memperluas kompetensi organisasi dalam usahanya mencapai target dan sasaran yang diputuskan, kinerja dan kompetensi yang dimiliki akan mempengaruhi pengelolaan keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. Besio, (2018) menggambarkan bahwa perilaku kerja inovatif tiap individu oleh pelaku kerja dapat meningkatkan kecakapan dalam lingkungan kerja dan mendukung kinerja dalam usahanya menggapai tujuan yang sebelumnya. Adanya keinovatifan kerja dapat dilihat dari aparatur desa yang dapat memberikan respon kepada setiap perubahan dengan praktik kerja baru dengan menciptakan ide-ide kreatif dan cara kerja yang efektif dan efisien (Brzozowski & Ferster, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Hadi, Putra & Mardikaningsih, (2020) dan Berliana & Arsanti, (2018) juga menemukan apabila perilaku kerja inovatif mempunyai pengaruh yang signifikan akan tata kelola keuangan dana desa. Berhasil atau tidaknya organisasi tergantung bagaimaimana kinerja individu dalam bekerja dan tidak terlepas dengan adanya usaha individu dalam berinovasi. Sesuai hal tersebut maka hipotesis 3 bisa disimpulkan:

H<sub>3</sub>: Perilaku kerja inovatif berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan dana desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 20 Desa. Kecamatan Balongbendo mempunyai luas wilayah sebesar 31,40 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 2.010 jiwa/km<sup>2</sup>. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pengamatan awal terkait masalah yang akan diteliti. Kecamatan Balongbendo menjadi salah satu kecamatan terdampak *covid-19* dengan jumlah pasien terbanyak setelah Kota Surabaya, masuk ke dalam zona merah kemiskinan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 5,56%, dan meningkatnya angka kemiskinan karena dampak *covid-19* di wilayah tersebut yang disebabkan oleh naiknya angka pengangguran. Dalam hal tersebut menarik untuk diteliti karena berhubungan dengan pengelolaan dan kebijakan *refocusing* dana desa karena adanya dampak *covid-19*. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan moralitas, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif aparatur desa. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen diantaranya yakni moralitas individu (X<sub>1</sub>), kapabilitas individu (X<sub>2</sub>), dan perilaku kerja inovatif (X<sub>3</sub>), serta terdapat satu variabel dependen yakni pengelolaan dana desa (Y).

Variabel moralitas individu (X<sub>1</sub>) dinilai dengan lima indikator yang diadopsi dari Febriani & Anik, (2020) dan dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Lima indikator tersebut adalah nilai kejujuran dan etika, kesadaran terhadap tanggung jawab kerja, integritas dalam bekerja, menaati setiap peraturan yang berlaku di suatu instansi dan amanah dalam bekerja, keterikatan pada

kelompok sosial dan semangat altruisme. Variabel kapabilitas individu ( $X_2$ ) dinilai dengan tujuh indikator yang diadopsi dari Harsono, (2016) dan dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Tujuh indikator tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman akan tugas yang dikerjakan, kesesuaian pekerjaan dengan bidang/ahli, mampu bekerja sama dalam suatu instansi, ketepatan dan kecakapan dalam bekerja, memahami peran dan fungsi dalam pengelolaan keuangan, kemampuan dalam menghadapi tantangan dan resiko yang ada, dan kemampuan komunikasi secara tertulis maupun lisan dengan baik. Variabel perilaku kerja inovatif ( $X_3$ ) dinilai dengan enam indikator yang diadopsi dari Setiawan, (2018) dan dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Enam indikator tersebut adalah mampu berpikir dinamis dalam meningkatkan kinerja, mampu mengadaptasi ide baru, kepekaan terhadap situasi, ketelitian dalam mendeteksi kesenjangan suatu pekerjaan, motivasi diri untuk selalu berinovasi, serta pemecahan masalah dan menemukan suatu solusi. Variabel pengelolaan dana desa (Y) dinilai dengan tiga indikator yang diadopsi dari Makalalag, Nangoy & Karamoy, (2017) dan Wardana, (2016) serta dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Tiga indikator tersebut adalah pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan.

Data kuantitatif merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data kuantitatif berbentuk angka atau skor yang telah ditabulasi dari semua jawaban responden dalam menjawab kuesioner yang disebar. Sumber data yang digunakan pada riset ini ialah data primer. Dalam riset ini data primer berbentuk kuesioner yang telah didistribusikan langsung ke responden.

Populasi yang terdapat pada riset ini yakni aparatur desa se-Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dalam masa jabatan 2019-2024. Jumlah keseluruhan desa se-Kecamatan Balongbendo yakni 20 Desa. Populasi dalam riset ini berjumlah 320 aparatur desa dari 20 Desa yang ada di Kecamatan Balongbendo, yakni satu desa terdiri atas 1 Kepala Desa, 10 Perangkat Desa beserta 5 BPD Desa. Metode pemilihan sampel dalam riset ini memakai metode *purposive sampling*. Sampel yang dipilih dalam riset ini merupakan perangkat desa dengan kinerja yang berhubungan secara langsung dengan tata kelola keuangan dana desa seperti, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Perencanaan Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Dusun.

Data dikumpulkan melalui teknik kuesioner. Kuesioner ialah bentuk cara pengumpulan data yang dijalankan melalui cara mengajukan beberapa pertanyaan tertulis yang ditujukan pada beberapa responden untuk diisi oleh responden dalam setiap pertanyaan yang ditulis dan diajukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Kuesioner pada penelitian ini memakai skala likert 4 poin. Penggunaan skala likert 4 poin ini dikarenakan peneliti tidak menginginkan jawaban netral, sehingga responden dapat memilih salah satu pernyataan yang diajukan dengan kecenderungan jawaban pro atau kontra. Pernyataan dalam kuesioner dibuat dengan merujuk pada indikator per variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner berisi 9 pernyataan yang diajukan dalam variabel  $X_1$ , 9 pernyataan dalam variabel  $X_2$ , 10 pernyataan dalam variabel  $X_3$ , dan 8 pernyataan dalam variabel Y. Kuesioner disebar secara langsung *door to door*

dengan mendatangi satu per satu kantor kepala desa dengan bentuk kuesioner yang tercetak.

Teknis analisis data yang digunakan yakni regresi linier berganda melalui SPSS IBM versi 26 dengan statistik deskriptif untuk mengulas dan meringkas semua data yang diperoleh menjadi bentuk sederhana yang mudah dipahami serta cepat dalam memberikan informasi. Macam uji yang digunakan diantaranya adalah uji instrument penelitian (uji validitas mempunyai fungsi sebagai alat taksir level kevalidan dari suatu kuesioner sebelum dilakukan uji selanjutnya. Sedangkan, uji reabilitas digunakan sebagai alat ukur indikator suatu variabel. Uji reabilitas akan menyatakan hasil seberapa jauh tingkatan sebuah instrument kuesioner konstan, konsekuen serta dapat dipercaya kebenaran/keabsahan apabila dilaksanakan berulang kali), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas), dan uji hipotesis (uji koefisien determinan ( $R^2$ ), uji simultan (uji-F), dan uji parsial (uji-T).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kuesioner yang disebar sebanyak 178 eksemplar kembali semua, dengan keterangan semua terisi lengkap dan memenuhi kriteria. Hal ini menghasilkan *reponse rate* sebesar 100 persen. Karakteristik yang diperoleh dari 178 orang yang mengisi kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1, yang meliputi jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan masa jabatan.

**Tabel 1. Kriteria Responden**

Kriteria		Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	131	73,6%
	Perempuan	47	26,4%
Usia	< 30 Tahun	20	11,2%
	30-40 Tahun	54	30,4%
	41-50 Tahun	52	29,2%
	> 51 Tahun	52	29,2%
Jenjang Pendidikan	SMA/SMK/Sederajat	110	61,8%
	Sarjana (S1)	61	34,3
	Diploma (D1/D2/D3)	6	3,3%
	Magister (S2)	1	0,6%
Masa Jabatan	< 5 Tahun	27	15,2%
	5-10 Tahun	58	32,6%
	> 10 Tahun	93	52,2%

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 1 menyatakan bahwa karakteristik responden paling banyak berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 131 responden, dengan didominasi umur 30 sampai 40 tahun sebanyak 54 responden, pendidikan terakhir paling banyak SMA/SMK/Sederajat dengan jumlah 110 responden dan rata-rata masa jabatan terbanyak yakni >10 tahun sebanyak 93 responden. Analisa statistik deskriptif ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan mengenai variabel penelitian yaitu pengelolaan dana desa (Y), moralitas individu ( $X_1$ ), kapabilitas individu ( $X_2$ ) dan perilaku kerja inovatif ( $X_3$ ).

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moralitas (X <sub>1</sub> )	178	24,00	36,00	30,567	2,599
Kapabilitas (X <sub>2</sub> )	178	24,00	36,00	29,455	2,307
Perilaku Kerja Inovatif (X <sub>3</sub> )	178	26,00	40,00	33,882	2,513
Pengelolaan Dana Desa (Y)	178	20,00	32,00	25,797	2,441
Valid N (listwise)	178				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 2 menggambarkan bahwa distribusi data yang diperoleh oleh peneliti dari variabel moralitas individu (X<sub>1</sub>) memiliki nilai rata-rata sebesar 30,567 atau mendekati nilai maksimum 36,00. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) yakni  $2,599 < 30,567$ . Hal tersebut mengartikan bahwa responden cenderung menjawab setuju/sangat setuju atas 9 pertanyaan yang diajukan dan penyimpangan data pada variabel X<sub>1</sub> sangat kecil. Variabel kapabilitas (X<sub>2</sub>) mempunyai nilai mean/rata-rata sebesar 29,455 atau mendekati nilai maksimum 36,00. Nilai standar deviasi memiliki nilai kurang dari mean sebesar  $2,307 < 29,455$ . Hal tersebut menjelaskan bahwa responden menjawab pertanyaan cenderung pro atas pertanyaan yang diajukan responden dan memiliki tingkat kesalahan/penyimpangan yang sangat rendah. Variabel perilaku kerja inovatif (X<sub>3</sub>) memiliki nilai mean sebesar 33,882 yang mendekati nilai maksimum 40,00 dan memiliki jawaban terendah sebesar 26,00 yang berarti bahwa jawaban responden mempunyai kecenderungan setuju. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai mean yakni sebesar  $2,513 < 33,882$  yang berarti bahwa tingkat penyimpangan data sangat kecil. Variabel pengelolaan dana desa (Y) mempunyai nilai rata-rata sebesar 25,797 yang mendekati nilai maksimum sebesar 32,00. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai mean sebesar  $2,441 < 25,797$ . Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai kesalahan/penyimpangan data dari variabel Y sangat rendah.

Uji asumsi klasik digunakan dalam mengukur besarnya penyimpangan data yang dilakukan peneliti (Sugiyono, 2017). Uji asumsi klasik yang diujikan pada riset ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual	
N	178	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,000
	Std. Deviation	1,801
Most Extreme Differences	Absolute	0,059
	Positive	0,039
	Negative	-0,059
Test Statistic	0,059	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Data penelitian dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi mencapai 0,05 atau  $> 0,05$  (Ghozali, 2016). Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig* memiliki nilai 0,200 lebih besar dari 0,05 artinya data berdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	0,295	1,385		
Moralitas (X <sub>1</sub> )	0,357	0,061	0,416	2,407
Kapabilitas (X <sub>2</sub> )	0,166	0,071	0,362	2,760
Perilaku Kerja Inovatif (X <sub>3</sub> )	0,286	0,063	0,363	2,757

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antar sesama variabel independen sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan tolerance > 0,1.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	0,297	1,344		0,221	0,826
Moralitas (X <sub>1</sub> )	0,075	0,039	0,171	1,921	0,056
Kapabilitas (X <sub>2</sub> )	-0,018	0,046	-0,036	-0,384	0,702
Perilaku Kerja Inovatif (X <sub>3</sub> )	-0,020	0,042	-0,045	-0,485	0,628

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 5 hasil uji multikolinearitas menyatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi yang dapat dilihat dari nilai sig. variabel moralitas (X<sub>1</sub>) yaitu 0,056 > 0,05, variabel kapabilitas (X<sub>2</sub>) yaitu 0,702 > 0,05, variabel perilaku kerja inovatif (X<sub>3</sub>) yaitu 0,628 > 0,05.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengkaji serta menelaah pengaruh dua atau lebih variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Pada teknik ini berasumsi adanya kaitan yang linear (garis lurus) antara variabel dependen dengan tiap prediktornya. Uji hipotesis mencakup atas uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>), uji simultan (uji-F), dan uji parsial (uji-T).

Uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>) ini dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa pengaruh variabel independen secara berbarengan atau simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang bisa dilihat dari hasil nilai Adjusted R Square. Nilai R Square dinyatakan kuat apabila lebih dari 0,67, moderat jika melebihi dari angka 0,33 namun dibawah dari angka 0,67, dan dinyatakan lemah apabila diatas 0,19 tetapi dibawah dari nilai 0,33.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,673 <sup>a</sup>	0,453	0,443	1,821

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 6 menyatakan bahwa nilai pada Adjusted R Square sebesar 0,443 yang berarti variabel independen yang mencakup moralitas individu (X<sub>1</sub>), kapabilitas individu (X<sub>2</sub>), dan perilaku kerja inovatif (X<sub>3</sub>) terhadap variabel tata kelola keuangan dana desa (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Balongbendo ialah sebesar 44,3 % dan berada pada kategori moderat karena angka tersebut diatas 0,33 tetapi dibawah dari 0,67 (Chin, 1998). Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,443 juga dapat

mengartikan bahwa variabel dependen tata kelola keuangan dana desa bisa dideskripsikan sebesar 44,3 % oleh variabel independen yang mencakup moralitas individu, kapabilitas individu, dan perilaku kerja inovatif, sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain.

Uji F (simultan) digunakan untuk mengulas lebih mendalam diterima atau tidaknya ketiga variabel dengan cara melihat  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan taraf signifikan yaitu  $< 0,05$  pada tabel Anova. Apabila ketiga variabel memiliki  $F_{hitung}$  lebih dari  $F_{tabel}$  maka ketiga variabel dapat diajukan, sedangkan apabila  $F_{hitung}$  kurang dari  $F_{tabel}$  maka ketiga variabel tidak dapat diajukan. Begitu juga dengan nilai signifikansi jika berada pada angka  $< 0,05$  maka variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

**Tabel 7. Uji F (Simultan)**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	477,428	3	159,143	47,967	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	577,291	174	3,318		
	Total	1.054,719	177			

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 7 mendeskripsikan bahwa angka  $F_{hitung} = 47,967$  dan nilai signifikansi menunjukkan pada level 0,000. Jadi  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yakni  $47,967 > 2,66$  (sig.  $0,000 < 0,05$ ). Hal ini mengatakan bahwa variabel moralitas individu, kapabilitas individu, dan perilaku kerja inovatif berpengaruh secara simultan terhadap variabel tata kelola keuangan dana desa.

Uji T (parsial) mengungkapkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mendeskripsikan variabel dependen. Uji T bertujuan untuk melakukan uji koefisien regresi secara individual atau dalam artian lain menemukan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji T bisa dinyatakan memiliki pengaruh jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig  $< 0,05$  dan nilai  $t_{tabel}$  pada 0,05 ialah 1,974.

**Tabel 8. Hasil Uji T (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Moralitas ( $X_1$ )	0,550	0,057	0,585	9,580	0,000
Kapabilitas ( $X_2$ )	0,514	0,070	0,486	7,376	0,000
Perilaku Kerja Inovatif ( $X_3$ )	0,530	0,061	0,546	8,640	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 8 hasil uji T membuktikan bahwa seluruh variabel independen mempunyai angka  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .  $t_{tabel}$  dalam uji T ini ialah 1,974. Variabel moralitas individu mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 9,580 dan nilai signifikansi 0,000 sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel moralitas individu mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel tata kelola keuangan dana desa. Untuk variabel kapabilitas individu mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,376 dan nilai signifikansi 0,000 sehingga bisa dikatakan bahwa variabel kapabilitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel tata kelola keuangan dana desa. Untuk variabel perilaku kerja inovatif individu mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8,640 dan nilai signifikansi 0,000 sehingga bisa dinyatakan bahwa variabel perilaku

kerja inovatif berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel tata kelola keuangan dana desa.

Hipotesis 1 membuktikan bahwa variabel moralitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan hasil output yang didapatkan melalui uji T yang membuktikan bahwa variabel moralitas individu memiliki taraf signifikansi lebih rendah dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga bisa diambil simpulan bahwa H1 diterima atau variabel moralitas mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang menunjukkan bahwa perangkat desa di Kecamatan Balongbendo sudah memiliki moralitas yang baik yang tercermin dari sebagian besar responden menjawab pertanyaan dengan indikator pengujian terkait moralitas individu dengan penilaian setuju atau sangat setuju. Indikator pengujian mencerminkan sikap kejujuran, etika yang baik, kepatuhan kerja, bertanggungjawab akan pekerjaan dan integritas kerja. Berlandaskan moralitas yang baik dalam diri individu maka akan mendorong aparatur desa untuk disiplin kerja, individu akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kinerja dan peraturan organisasi. Tingginya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh moralitas individu yang semakin baik dalam diri aparatur desa. Tingkatan moralitas individu yang tinggi akan bisa meminimalisir dan menghindari adanya kecurangan karena setiap personal yang bermoral tinggi akan mengikuti segala aturan berdasar atribut etika umum. Apabila moralitas individu aparatur desa yang dimiliki tinggi, maka akan semakin memperlihatkan keperluan masyarakat luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun lingkungan kerjanya. Individu yang mempunyai moral yang baik tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Aparat desa yang memiliki moral yang baik tentunya tidak akan menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa. Dalam artian lain tidak akan menyelewengkan dana desa. Moralitas yang ada pada aparatur desa di pemerintah desa Kecamatan Balongbendo mayoritas bermoralitas tinggi, juga dikarenakan seringnya diadakan sosialisasi tentang kesadaran moral menjadi salah satu alasan penyebabnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kohlberg (1963) mengenai teori perkembangan moral Kohlberg, menyatakan bahwa perkembangan moral merupakan perkembangan yang memiliki hubungan dengan kaidah serta konvensi terkait apa yang sebaiknya untuk dilaksanakan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Tidak hanya itu, pernyataan sebelumnya juga selaras dengan teori stewardship yang berarti bahwa pemerintah desa sebagai pihak steward/pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah mampu bertanggungjawab penuh atas amanah yang dipercayakan disertai dengan moral yang baik dalam bekerja sehingga dapat menunjukkan kebermanfaatannya kepada masyarakat desa/principal. Hasil riset ini juga substansial dengan riset terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf, *et al.* (2018), Rahimah, *et al.* (2018), Lestari & Ayu (2021), dan Mutmainah (2022) yang membuktikan bahwa moralitas individu mempunyai pengaruh positif terhadap tata kelola keuangan dana desa.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel kapabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap tata kelola keuangan dana desa di Pemerintah Desa di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan hasil output yang didapatkan melalui uji T yang menunjukkan bahwa variabel kapabilitas individu mempunyai taraf signifikansi  $< 0,05$  yaitu dengan besaran 0,000, sehingga bisa diambil simpulan bahwa H2 diterima atau variabel kapabilitas individu mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang memperlihatkan karakteristik responden mempunyai pendidikan terakhir S1 dan S2 dan didukung pula pada jawaban responden yang menjawab pertanyaan dengan kecenderungan jawaban pro dengan indikator pertanyaan yang mencerminkan sikap pemahaman akan tugas, peran, dan fungsi kerja, kesesuaian bidang kerja dengan keahlian, ketepatan dan kecakapan kerja, serta kerja sama dalam suatu instansi yang berarti bahwa perangkat desa di Kecamatan Balongbendo mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan dana desa bisa terbebas dari tindakan kecurangan dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan sasaran kerja yang tepat. Apabila tingkat kapabilitas yang dimiliki oleh suatu individu semakin meningkat maka pengelolaan dana desa yang dijalankan akan semakin baik. Individu yang konsisten dan mau terus belajar dalam mengembangkan kapabilitas pada dirinya bisa menjadikan dirinya makin terampil dan bisa mengembangkan kinerja serta mengurangi tingkat kecerobohan dalam bekerja. Begitu pula, apabila individu yang tidak memiliki pemahaman yang cukup akan tidak lancar dalam bekerja serta juga menimbulkan terjadinya ketidakefisienan bahan, tenaga, serta waktu. Hal ini searah dengan teori kapabilitas dinamik yang merumuskan bahwa unsur manusia yang mumpuni serta berproses yang baik, keduanya menciptakan komponen-komponen dari kapabilitas dinamik, berbentuk misalnya visioner (*thinking ahead*), menafsirkan ulang (*thinking again*) serta berpikir *out of the box/thinking across* (Teece, Pisano, Shuen, 1997). Kultur masyarakat Kecamatan Balongbendo yang sudah tidak lagi sederhana melainkan sudah memahami digitalisasi teknologi semakin mendukung tingginya tingkat kapabilitas individu aparatur desa, dengan adanya pemahaman digital membuat aparatur desa lebih mudah dalam *sharing* ilmu dalam bekerja. Begitu pula dengan adanya kultur masyarakat yang tidak lagi sederhana membuat individu berlomba dalam memperoleh jabatan dengan penghasilan yang sesuai akan kebutuhan hidup. Semakin individu berlomba dalam jabatan akan semakin meningkatkan kualitas atau kapabilitas dirinya dalam bekerja yang akan berdampak secara langsung terhadap tata kelola dana desa yang baik karena kinerja meningkat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Respatiningsih & Sudirjo (2015), Adiputra & Mandala (2017) dan Azmi & Harti (2021) juga menemukan bahwa kapabilitas mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja entitas dan juga kinerja dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Hipotesis 3 mengatakan bahwa variabel perilaku kerja inovatif berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan dana desa di Pemerintah Desa di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan hasil output yang didapatkan melalui uji T yang membuktikan bahwa variabel perilaku

kerja inovatif memiliki taraf signifikansi kurang dari 0,05 yakni sebesar 0,000, sehingga bisa dirumuskan H3 diterima atau variabel perilaku kerja inovatif mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Apabila perilaku kerja inovatif yang dimiliki oleh individu meningkat maka akan semakin baik tata kelola keuangan dana desa yang dijalankan. Kepala desa di Kecamatan Balongbendo sudah memotivasi anggotanya untuk bekerja dan mencari jalan keluar ketika terjadi permasalahan organisasi dalam situasi pandemi *covid-19* untuk turut serta dalam bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan bagi kemakmuran masyarakat luas, hal tersebut sesuai dengan jawaban responden pada pertanyaan dengan indikator pengujian terkait kinerja aparatur desa yang inovatif yang sebagian besar menjawab dengan penilaian setuju atau sangat setuju. Indikator pertanyaan mencerminkan perangkat pemerintah desa memiliki ketelitian dalam mendeteksi kesenjangan suatu pekerjaan, motivasi diri untuk selalu berinovasi, serta pemecahan masalah dan menemukan suatu solusi sesuai dengan indikator pertanyaan. *Perilaku kerja inovatif dalam diri aparatur desa* dapat menunjang kinerja dan memperluas kompetensi organisasi dalam usahanya mencapai target dan sasaran yang diputuskan, kinerja dan kompetensi yang dimiliki akan mempengaruhi pengelolaan keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. Kinerja aparatur desa dapat meningkat melalui efisiensi dan perbaikan berbagai kegiatan kerja melalui inovasi yang dilakukan oleh individu. Pernyataan ini sesuai dengan teori *Conservation Of Resources (COR)* yang dijelaskan oleh Hobfoll, et.al., (2018) yang mengungkapkan bahwa personal yang dihadapkan pada ketentuan kerja akan meningkatkan kapasitas yang tersisa serta kapitalis psikologis dengan tindakan kerja yang inovatif guna memperoleh modal kerja baru, misalnya kemajuan dalam situasi kerja, kesehatan dan kenyamanan lingkungan kerja hingga perluasan karir. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Hadi, Putra, & Mardikaningsih, (2020) dan Berliana & Arsanti, (2018) juga menemukan apabila perilaku kerja inovatif mempunyai pengaruh positif terhadap tata kelola keuangan dana desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan kesimpulan bahwa moralitas, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di pemerintah desa yang ada di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Moralitas yang baik pada aparatur desa mampu meminimalisir terjadinya kecurangan sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, ditandai dengan sikap kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, etika yang baik sesama aparatur desa dan masyarakat, kepatuhan akan aturan kerja, dan tanggung jawab kerja. Adapun kapabilitas seperti pemahaman akan tugas dengan baik dan ketepatan dan kecakapan kerja dapat mendukung terlaksananya pengelolaan dana desa dengan baik karena dengan pemahaman yang bagus maka kinerja aparatur akan berjalan lancar dan tidak menimbulkan inefisiensi bahan, tenaga, dan waktu. Begitu pula dengan perilaku kerja inovatif aparatur desa akan mendukung berjalannya pengelolaan dana desa dengan baik karena mampu menyesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi dan tantangan kerja yang tidak terduga serta dapat mencari solusi akan masalah yang

sedang dihadapi. Penelitian ini melibatkan satu kecamatan saja sehingga untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas wilayah penelitian dengan melihat karakter tiap daerah yang berbeda, segi tingkat kecerdasan, kebudayaan sosial yang mempengaruhi serta kecenderungan terjadinya kasus di wilayah tertentu. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap tata kelola keuangan dana desa untuk mengembangkan penelitian menjadi lebih baik lagi.

Bagi pemerintahan desa, hasil riset ini bisa menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pengelolaan dana desa di waktu mendatang khususnya dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran dana desa agar lebih efektif dan terhindar dari tindakan kecurangan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat desa. Dengan penerapan kebijakan tata kelola dana desa yang baik maka kepercayaan masyarakat pada kualitas kinerja pemerintah desa akan semakin meningkat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terlaksananya pengelolaan dana desa yang baik dalam realokasi dan *refocusing* APBN.

## REFERENSI

- Abdulkarim, R. (2019). Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(4), 580–593. <https://doi.org/10.37476/akmen.v16i4.801>
- Adiputra, I. P. P., & Mandala, K. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Kapasitas Terhadap Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(11), 6090–6119.
- Ainul Mutmainah. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Moralitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene*, 21-27.
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 1–33.
- Alawattage, C., Jayathileka, C., Hitibandara, R., & Withanage, S. (2022). Moral economy, performative materialism, and political rhetorics of sustainability accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, July, 102507. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102507>
- Arfiansyah, M. A. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan ...*, 2(1), 49–68.
- Azmi, Z., & Harti, I. D. (2021). Pengaruh Akuntansi Manajemen Strategik dan Kapabilitas Organisasional Terhadap Kinerja Organisasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 266. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.309>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia september 2020. In *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret*, 7(56), 1–12.
- Baharuddin, S. M., & Sulfati, A. (2020). *Ekonomi di Pusaran Badai Covid-19*.
- Berliana, V., & Arsanti, T. A. (2018). Analisis Pengaruh Self-efficacy, Kapabilitas, dan Perilaku Kerja Inovatif terhadap Kinerja. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen*,

- Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 7(2), 149.  
<https://doi.org/10.30588/jmp.v7i2.364>
- Besio, C. (2018). Moral and Innovation in Organisationen. Deutschland: Innovation und Gesellschaft, 17-19. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20273-6>
- Brzozowski, M., & Ferster, I. (2016). Efek Mediasi Kecerdasan Emosi pada Pengaruh Supervisi Kolaboratif dan Kepemimpinan Terhadap Perilaku Inovatif Guru. *Educational Leadership and Administration*, 5(2), 1-21. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1624-8.ch001>
- Chatterjee, S., Chaudhuri, R., Gonzalez, V. I., Kumar, A., & Singh, S. K. (2022). Resource integration and dynamic capability of frontline employee during COVID-19 pandemic: From value creation and engineering management perspectives. *Technological Forecasting and Social Change*, 176(November 2021). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121446>
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295, 336
- CNN Indonesia. (2019). ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat. *Cnnindonesia.Com*, 1-6.
- David J. Teece; Gary Pisano; Amy Shuen. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management David. *American Journal of Psychotherapy*, 63(1), 13-23. <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2009.63.1.13>
- Dewi, L. F. A. A., Yuniasanti, R., & Prahara, S. A. (2017). Hubungan Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja Dengan Perilaku Inovatif Karyawan Bagian Penjualan. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 19(1), 13. <https://doi.org/10.26486/psikologi.v19i1.597>
- Diatmika & Rahayu. (2020). Kompetensi Perangkat DEsa Terhadap Ssitem Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. *Molecules*, 2(1), 1-12.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Kebijakan Dana Desa Tahun 2021. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (p. 7).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fadly, A., Wahyudi, I., & Yetti, S. (2020). Pengaruh Fraud Diamond terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2014 - 2018. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1 No 2, 139-151.
- Fanani, A. F., Astutik, W., & Wahyono, D. (2014). *Analisis Undang-Undang Desa. 1945*, 1-14.
- Fathur. (2016). Korupsi di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 13-14.
- Febriani, T., & Anik, S. (2020). Pengaruh Faktor Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Personal Culture Dan Independensi Pada Kecurangan Akuntansi (Fraud) Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Kabupaten Jepara. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1, 356-378.
- Ghozali. (2016). Risk governance & control: Financial markets and institutions. *VIRTUS Interpress*, 4(2), 85-159.
- Gide, A. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5-24.
- Gilchrist, R. P. & D. (2018). Public Sector Accounting, Accountability and

- Governance. In *Public Sector Accounting, Accountability and Governance*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315121727>
- Hadi, S., Putra, A. R., & Mardikaningsih, R. (2020a). Pengaruh Perilaku Inovatif Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(1). <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v3i1.38>
- Hadi, S., Putra, A. R., & Mardikaningsih, R. (2020b). Pengaruh Perilaku Inovatif Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(1), 186–197. <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v3i1.38>
- Harsono, P. (2016). Kapabilitas Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 178–188.  
<https://doi.org/10.31506/jap.v7i2.2455>
- Hasanah, S. F., Suyasa, P. T. Y. ., & Dewi, F. I. (2019). Perilaku Kerja Inovatif ditinjau dari Modal Psikologis, Tuntutan Kerja, dan Sumber Daya Pekerjaan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(2), 475.  
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i2.3353.2019>
- Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J. P., & Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 5(November 2017), 103–128. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104640>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kemenkeu. (2022) Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022. Diakses pada 26 Oktober 2022, dari  
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>.
- Kerstein, S. J. (2002). *Kant ' s Search for the Supreme Principle of Morality*. University of Maryland, College Park.
- Kohlberg, B. L. (1963). *The Development of Children ' s Orientations Toward a Moral Order I . Sequence in the Development of Moral Thought Author ( s ) : Lawrence Kohlberg Published by : S. Karger AG Stable. Diakses pada 28 Desember 2022, dari <https://www.jstor.org/stable/26762149> The Development of Children*. 6(1), 11–33.
- Kurzhals, K. (2015). *Resource Recombination in Firm From a Dynamic Capability Perspective*. Diakses pada 17 November 2022, dari  
<http://curve.coventry.ac.uk/open>
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi ). *Akuntansi*, 101–116.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1).
- Mardiana, S., Hasanah, Y. M., Supriyatna, W., Zakaria, Z., & Indirasari, I. (2021). Optimalisasi Anggaran Keuangan Desa Lanjutan D Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang-Banten. *Dedikasi Pkm*, 2(2), 260.  
<https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i2.10308>

- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430.  
<https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Ndruru, O., & Halawa, R. (2020). Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan (Studi: Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan). *Jurnal Governance Opinion*, 5(2).
- Ozler, S. &, & Gabrinetti, P. (2017). Psychoanalytic Studies of the Work of Adam Smith. In *Psychoanalytic Studies of the Work of Adam Smith*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315666204>
- Pemerintah Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Bupati. (2021). Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, 3 6 (2021).
- Rahimah, N. L., Yetty, M., & Shanti, L. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 6, 139-154.
- Respatiningsih, I., & Sudirjo, F. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, Kapabilitas dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi Empirik pada Inspektorat Kabupaten Pemalang). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 2302-2752.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119-130.
- Samankova, D., Preiss, M., & Prihodova, T. (2018). The Contextual Character of Moral Integrity. In *The Contextual Character of Moral Integrity*.  
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-89536-9>
- Setiawan, L. A. R. (2018). Hubungan Antara Komitmen Organisasi Dan Perilaku Inovatif Pada Karyawan Bank.
- Suaib, E., & Bake, J. (2016). The Effectiveness of " APB-Desa" Management in West Muna Regency. In *MIMBAR* (Vol. 32, Issue 2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wardana, I. (2016). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). *Jurnal Akuntansi*, 1979, 118.
- Yusuf, M., Ibrahim, I., & Yusdhaniar. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa ( Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah ). 1-12.  
<https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>